

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Adami Chazawi. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makassar

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum pidana untuk tiap orang*.

Darma S.S. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, PT Djaniatan, Jakarta.

Darwis. Dkk. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Pusat Pengembangan Pendidikan, Pekanbaru.

Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.

Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.

*Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.*

Irfan Ardiansyah. 2017. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Hawa dan AHWA, Pekanbaru.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*, Mirra Buana Media, Yogyakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*, Kencana, Kencana Pranamedia Group, Jakarta.



iwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan raktek*, Kepel Press, Yogyakarta.

- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M.Suparmoko. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta.
- M.Yahya Harahap. 2019. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1984 *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, Bina Aksara, Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung.
- Ramiyanto. 2018. *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan Perkembangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Edisi Ke-5, Rajawali Pers, Jakarta.*
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- T. Hani Handoko. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Grasindo, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Depok.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.



Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika ditama, Bandung.

## **JURNAL :**

Chindy. Yapin. 2019. *Perlindungan Hukum Petani Sebagai Konsumen Dalam Perdagangan Dan Peredaran Pupuk Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Putusan Nomor 2640 K/Pid.Sus/2016)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2. Nomor 2.

Misrah. 2020. *Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep*, Jurnal Unismuh, Volume 1. Nomor 2.

Misrah. 2020. *Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kabupaten Pangkep*, Jurnal Unismuh, Volume 1. Nomor 2.

Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 47. Nomor 3.

Syarif Saddam Rivanie. dkk. 2022, *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Halu Oleo Law Review, Volume 6, Nomor 2.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 511).

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26).



in Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469).

Peraturan Presiden No 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 30).

### **SKRIPSI/TESIS :**

Setia Rahendranda, 2011, Pembuatan Aplikasi Sistem Monitoring Distribusi Pupuk dan Benih Bersubsidi Menggunakan Kartu Kendali di Departemen Pertanian. Thesis, Gunadarma University.

### **WEBSITE :**

<https://kemenperin.go.id/artikel/591/Menperindag-keluarkan-Aturan-Baru-Tentang-Pengadaan-Dan-Penyaluran-Pupuk-Bersubsidi-Untuk-Sektor-Pertanian> diakses pada tanggal 24 Maret 2024, pukul 21:40 WITA.

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/bacartikel/14656/Mengenal-Putusan-Sela-dan-Jenisnya.html> diakses pada tanggal 23 Mei 2024, pukul 22:00.

<https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-putusan-hakim/#:~:text=Putusan%20Akhir%2C%20yaitu%20putusan%20yang,pengadilan%20banding%20dan%20mahkamah%20agung> diakses pada tanggal 23 Mei 2024, pukul 22:00.

